

Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klaten

Wulan Suci Rachmadani ^{*1}, Nur Kabib ², Rizky Windar Amelia ³, Widodo ⁴

^{1,4}Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²Program Studi Akuntansi Syariah, IAIN Salatiga, Indonesia

³Program Studi Manajemen Perpajakan, Universitas Widya Dharma Klaten, Indonesia

e-mail: ^{*1}wulansuci1986@mail.unnes.ac.id, ²nurkabib@iainsalatiga.ac.id,
³kiiky.windar@gmail.com, ⁴widodo16@students.unnes.ac.id

Abstrak

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Namun pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut merupakan hal yang sulit bagi BUMDes karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi BUMDes. Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi BUMDes adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi. Kesulitan ini juga dirasakan oleh para pengurus BUMDes Socokangsi. Oleh sebab itu, pengabdian menawarkan pelatihan pembuatan laporan keuangan khususnya pada arus kas untuk pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, para peserta pengelola usaha BUMDes Socokangsi, Klaten diharapkan memiliki kemampuan menyusun laporan dan pengelolaan keuangan usahanya. Pengurus BUMDes Socokangsi, Klaten juga dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengabdian juga membuat jurnal tentang pengelolaan keuangan pada BUMDes Socokangsi, Klaten.

Kata kunci: Arus kas, BUMDes, Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Menurut [1] BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. BUMDes juga menjadi pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuannya untuk mampu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian desa[2]. Secara umum, BUMDes sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas (*closed loop problems*), seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga BUMDes sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar[3]. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan

keberlangsungan BUMDes. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku BUMDes terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar.

Menurut [4] pengelolaan keuangan desa/BUMDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, kenyataannya mayoritas pengusaha BUMDes tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya[5]. Padahal sebagai lembaga keuangan Desa yang menjalankan bisnis keuangan BUMDes memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan unit-unit usahanya setiap bulan dengan jujur dan transparan[6]. Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha BUMDes dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan. Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi BUMDes karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi BUMDes. Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi BUMDes adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa [7]. Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk ke dalam wilayah cepat tumbuh, Kabupaten Klaten memiliki aktivitas ekonomi utama yaitu perdagangan, jasa, dan industri. Hal ini menjadikan Kabupaten Klaten termasuk ke dalam klasifikasi Kota Metropolitan yang pembangunan kotanya sudah mengarah ke perkembangan industri. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2015-2020, terdapat isu strategis pengembangan kota terkait peningkatan ekonomi dan daya saing daerah[8].

Salah satu industri yang sedang giat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melalui BUMDes. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) [9]. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar. Pelatihan Penatausahaan Arus Kas diharapkan menjadi sebuah solusi bagi pelaku BUMDes dalam membuat laporan keuangan secara mudah, walaupun dalam hal ini pelaku BUMDes tidak memiliki basic akuntansi. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pula kualitas BUMDes di Desa Socokangsi, Klaten.

Terkait dengan pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes berbasis IT, maka proses penguatan Pelaku BUMDes melalui pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan akan mendorong kinerja dari BUMDes. Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan serta pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang ada. Namun praktik akuntansi pada BUMDes masih tergolong rendah. Pembukuan BUMDes masih dilakukan secara sederhana dan tidak detail, hampir semua BUMDes di Indonesia hanya mencatat keuangan dari sumber masuk dan sumber uang. Dengan kata lain, pelaku BUMDes hanya mencatat keuangan usahanya sesuai dengan arus kas saja. Hal tersebut mengakibatkan masalah kesulitan BUMDes mengakses pinjaman melalui perbankan. Hal ini memunculkan inovasi untuk mempermudah pencatatan keuangan dengan menggunakan basis IT pada BUMDes.

Kegiatan Pengabdian bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes. Kegiatan ini dilakukan pada BUMDes yang berada di Desa Socokangsi, Klaten. Pemilihan didasarkan pada situasi bahwa pengelola BUMDes belum memahami bagaimana merencanakan keuangan BUMDes, penatausahaan keuangan BUMDes, dan belum memahami pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDes. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar karena seluruh transaksi keuangan akan dipertanggungjawabkan kepada Desa. Tujuan

kegiatan ini adalah untuk mempermudah pencatatan keuangan berbasis IT pada BUMDes di Desa Socokangsi, Klaten.

2. METODE

Beberapa metode pendekatan digunakan untuk menyelesaikan persoalan prioritas dalam memahami pelaku BUMDes dalam melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan BUMDes:

- a) Melakukan identifikasi sejauh mana pengetahuan pelaku BUMDes dalam melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan BUMDes
- b) Melakukan sosialisasi pentingnya melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan BUMDes.
- c) Pelatihan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan BUMDes.
- d) Pendampingan dan pengamatan praktik pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan BUMDes.
- e) Pemberian umpan balik

Rincian prosedur kerja akan diuraikan berdasarkan tahap-tahap pendekatan yang dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Identifikasi sejauh mana pengetahuan pelaku BUMDes dalam melakukan pencatatan akuntansi laporan keuangan BUMDes.
- b) Identifikasi dilakukan dengan wawancara langsung pelaku BUMDes dalam melakukan pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan terintegrasi BUMDes. Selain itu identifikasi juga dilengkapi dengan pengisian kuesioner dan wawancara pada masyarakat pelaku BUMDes di sekitar tempat usaha.
- c) Sosialisasi pentingnya melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan terintegrasi BUMDes. Sosialisasi dilakukan sebagai ajang pengenalan dalam melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan terintegrasi BUMDes pada pelaku BUMDes. Materi sosialisasi meliputi: pengertian laporan keuangan, manfaat pencatatan sistem aplikasi akuntansi secara rinci, cara melihat kinerja keuangan melalui laporan keuangan dan praktik dalam melakukan input sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan terintegrasi BUMDes.
- d) Pelatihan dalam melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan terintegrasi BUMDes. Berdasarkan teori [10] laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil output dari proses kegiatan akuntansi keuangan setelah perusahaan menjalankan aktivitasnya selama satu periode tertentu, misalnya satu tahun, satu semester, satu kuartal atau bahkan mungkin satu bulan. Informasi keuangan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas itulah yang pada hakikatnya disebut sebagai laporan keuangan (*financial statement*) perusahaan. Macam-macam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan terdiri atas: laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas (modal), neraca.
- e) Pendampingan praktik pencatatan sistem aplikasi akuntansi terintegrasi BUMDes. Setelah diajarkan strategi dalam melakukan praktik pencatatan akuntansi, tim pengabdian akan mendampingi pelaku BUMDes untuk melakukan pencatatan sistem aplikasi akuntansi secara tepat.
- f) Pemberian umpan balik dilakukan dengan cara memberikan praktik sistem aplikasi pencatatan secara dari hal yang lebih mudah terlebih dahulu hingga uji coba menggunakan sistem aplikasi pelaporan keuangan. Pada sesi ini diidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta pelatihan untuk kemudian diberikan solusi. Selain itu pengidentifikasi juga saran dan masukan dari peserta pelatihan untuk keperluan tindak lanjut kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat mengenai Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klaten dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Peserta dari kegiatan ini adalah pelaku usaha dari BUMDes di Desa Socokangsi, Klaten. Sebelum ke melakukan kegiatan pengabdian kepada BUMDes Socokangsi, Tim pengabdian terlebih dahulu mengunjungi kantor Desa Socokangsi untuk mendapatkan informasi mengenai BUMDes. Rincian kegiatan tersaji dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Rincian kegiatan

Langkah	Kegiatan	Tujuan	Hasil
1	Melakukan penjelasan mengenai teori pencatatan sistem aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar akuntansi Keuangan (SAK) EMKM	Agar mitra memiliki pengetahuan tentang teori sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM	Mitra kegiatan memiliki pengetahuan tentang teorisistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM
2	Pemberian pelatihan sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)EMKM	Agar Mitra kegiatan dapat memahami pelatihan dalam melakukan sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	Seluruh mitra kegiatan mampu memahami praktik sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
3	Praktik melakukan sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM	Agar Mitra kegiatan mampu praktik di lapangan, dan mampu mengoperasikan sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM	Mitra kegiatan melakukan praktik sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM sesuai yang telah diajarkan melalui pelatihan



Gambar 1 Wawancara dengan Perangkat Desa dan pelaku BUMDes



Gambar 2 Sosialisasi dengan pelaku BUMDes

Setelah pelaku BUMDes diberi pelatihan, selanjutnya tim pengabdian melakukan evaluasi dan monitoring dari hasil pelatihan. Kegiatan dilakukan untuk memantau kemampuan pelaku BUMDes untuk melakukan pencatatan keuangan secara mandiri setelah diberi pelatihan. Kegiatan evaluasi juga dimaksudkan untuk melakukan identifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta pelatihan dan kemudian diberikan solusi. Selain itu juga untuk mengidentifikasi saran dan masukan dari peserta pelatihan untuk keperluan tindak lanjut kegiatan pengabdian.

Hasil dari kegiatan Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klaten diuraikan sebagai berikut ini:

- a) Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, mitra memiliki pengetahuan tentang teori sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM.
- b) Seluruh mitra kegiatan mampu memahami praktik sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
- c) Mitra kegiatan melakukan praktik sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM sesuai yang telah diajarkan melalui pelatihan.
- d) Kegiatan pengabdian sudah berjalan dengan lancar, namun jika ditinjau berdasarkan [4] masih belum optimal, khususnya pada aspek penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat mengenai Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klaten dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Selama acara peserta tersebut telah dibekali dengan bagaimana melakukan perencanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang berbasis IT. Hasil dari kegiatan Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klaten diuraikan sebagai berikut ini:

- a) Pelaku BUMDes harus memahami teori sistem pencatatan aplikasi akuntansi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan EMKM, karena dengan bekal ini pelaku BUMDes mampu membuat laporan keuangan secara detail untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari usaha yang dijalankan.
- b) Dengan kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik hal ini dapat bermanfaat untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan serta pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang ada.
- c) Dalam pengelolaan keuangan BUMDes perlu kerjasama dan komitmen bersama antar pengelola guna menciptakan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat tercapai unit usaha yang akuntabel dan suistanabel.

5. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

- a) Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai Penatausahaan Arus Kas atau kegiatan yang serupa diharapkan dapat terus berlanjut bahkan sampai ke daerah lain.
- b) Untuk pelaku BUMDes diharapkan dapat terus menerapkan pengetahuan mengenai pencatatan laporan dengan baik menjamin transparansi dan akuntabilitas dari usaha yang dijalankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dan mendukung sampai terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11, "Badan Usaha Milik Desa," 2021.
- [2] K. Ginanjar, "Kemiskinan," *Balai Pustaka. Indones.*, 1997.
- [3] J. Abor and P. Quartey, "Issues in SME development in Ghana and South Africa," *Int. Res. J. Financ. Econ.*, vol. 39, no. July, pp. 218–228, 2010.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20, "Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.
- [5] T. Baas and M. Schrooten, "Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis," *Small Bus. Econ.*, vol. 27, no. 2, pp. 127–137, 2006, doi: 10.1007/sl.
- [6] R. Abdurrahman, Y. M. Basri, A. Azhar. A, and E. Darlis, "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kampar," *COMSEP J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 126–131, 2021, doi: 10.54951/comsep.v2i1.85.
- [7] Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022. [Online]. Available: <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- [8] I. Susila, A. D. B. Bawono, and H. Purbasari, "Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan BUMDesa di Desa Sidowayah Kabupaten Klaten," *Pros. Univ. Res. Colloq.*, pp. 337–348, 2020, [Online]. Available: <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1020>

- [9] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- [10] A. Wahyudin and M. Khafid, *Akuntansi Dasar*. Semarang: Unnes Press, 2007.